

SENIN, 15 APRIL 2019

Kalah Legawa, Jangan Ngamuk

Oleh **Kusnadi Chandrajaya**

KALAU semua berjalan lancar, lebih dari 190 juta rakyat Indonesia pemegang hak pilih, Rabu 17 Juli, akan menggunakan haknya memilih tokoh-tokoh idola mereka untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, dan Presiden-Wakil Presiden RI untuk masa bakti 2019-2024. Boleh juga mencoblos partainya. WNI di luar negeri yang menggunakan jasa pos bahkan sudah lebih dulu menggunakan hak pilih mereka.

Peristiwa politik sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi kali ini bisa dikatakan sebagai eksperimen karena untuk kali pertamanya pemilihan umum (pemilu) dua lembaga, legislatif dan eksekutif, dilaksanakan secara serentak. Jika sukses akan tercatat sebagai peristiwa bersejarah dan hebat. Sebab, melaksanakan pemilu di negeri berpenduduk besar (265 juta) yang menghuni ribuan pulau dengan ratusan suku dan menganut agama yang berbeda-beda ini bukanlah hal yang mudah. Negara juga harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp 25 triliun.

Sebanyak 245.000 lebih calon anggota legislatif (caleg) dari 16 partai politik (parpol) peserta pemilu akan memperebutkan kursi-kursi di lembaga legislatif dari tingkat pusat hingga daerah. Calon presiden dan wakil presiden yang hanya dua pasang memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Apalagi dua calon presidennya adalah tokoh yang tidak asing lagi.

Rumit dan Melelahkan

Pemilu serentak memilih pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah banyak dinilai sebagai pemilu yang rumit. Partai peserta sangat banyak, yakni 16 partai, jumlah caleg yang hampir seperempat juta dan “disebar” dalam empat lembar surat suara (DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten) berukuran lebar bisa saja membuat banyak pemilih kebingungan memilih wakilnya. Beruntung, KPU membolehkan orang “yang bingung” untuk memilih partai yang cocok saja.

Namun persoalan mungkin akan muncul pada sebagian orang ketika selesai mencoblos dan harus melipat kembali surat suara.

Sebab, untuk DPR RI dan



tahap, sedangkan DPD tiga kali dan presiden-wakil presiden sekali lipat saja.

Benarkah melelahkan? Hal ini bisa dilihat dari proses pemilu serentak yang memerlukan waktu hampir satu tahun, sejak Juli 2018 tahapan administrasi untuk menentukan calon tetap anggota dewan, calon tetap presiden dan wakil presiden, parpol peserta pemilu, pendaftaran pemilih, dan lain-lain. Lalu, kampanye bertahap-tahap selama delapan bulan, mulai September 2018 sampai menjelang hari H pencoblosan.

Kita semua tahu dan merasakan betapa nuansa kampanye yang bermula biasa-biasa saja pada akhirnya menghangat setelah beberapa kali acara debat capres-cawapres dan tahapan kampanye terbuka yang diwarnai suasana ingar bingar. Berita-berita hoaks yang bermunculan menambah runyam suasana. Tidak berlebihan kalau dikatakan ada kecenderungan upaya ingin mengacaukan proses pemilu dan menjatuhkan lawan secara tidak sehat.



Berita-berita hoaks yang bermunculan menambah runyam suasana. Tidak berlebihan kalau dikatakan ada kecenderungan upaya ingin mengacaukan proses pemilu dan menjatuhkan lawan secara tidak sehat.



Yang lelah adalah semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pemilu ini, dari KPU dan jajaran-nya sampai tingkat KPPS, Bawaslu, penegak hukum, dan tentu saja para caleg serta pasangan capres-cawapres bersama pendukungnya. Para caleg, lebih-lebih para caleg DPR-DPRD, harus berjuang keras. Sebab, selain untuk kemenangan dirinya, mereka juga masih harus menyukseskan perolehan suara partainya dan capres-cawapres yang didukungnya. Belum lagi soal dana yang harus dikeluarkan yang cukup besar.

Menurut Lembaga Penelitian Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI, ongkos yang dikeluarkan oleh seorang caleg DPR dan DPD bisa mencapai Rp 2 miliar, DPRD provinsi Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar, dan DPRD kota/kabupaten Rp 250 juta sampai Rp 300 juta. Dana yang diperlukan untuk capres-cawapres mungkin juga sampai ratusan miliar rupiah.

Namun biaya tentu bukan persoalan, terutama jika meraih kemenangan, karena setelah itu mereka akan menggenggam kekuasaan di samping berkesempatan mengabdikan kepada rakyat dan negara. Mungkin juga ada tujuan ekonomi karena para wakil rakyat, misalnya, akan menjadi elite politik berpenghasilan banyak dengan berbagai fasilitas sebagai orang terhormat. Menjadi anggota DPR dan DPD misalnya, akan berpenghasilan Rp 70 jutaan sampai Rp 80 jutaan dari gaji dan berbagai penerimaan lain tiap bulan. Anggota DPRD di daerah bergantung pada kemampuan daerahnya. Kita pun maklum mengapa begitu banyak orang tertarik untuk menjadi wakil rakyat karena ternyata ada ribuan caleg yang berstatus “belum bekerja”.

Menang dan Kalah

Kini proses pemilu serentak sudah berada pada tahapan akhir yang menentukan. Rakyat sudah mendengar berbagai janji dari para kontestan. Pada tanggal 17 April itulah nasib “para petarung” ditentukan oleh hasil hitungan suara di TPS-TPS di seluruh Tana Air dan luar negeri. Pertanyaan kita tentu saja, siapkah mereka menerima kenyataan, misalnya kalah atau suara yang diperoleh tidak mencukupi untuk menjadi wakil rakyat? Siap jugakah pasangan capres-cawapres beserta para pendukungnya mengakui keunggulan lawannya?

Kita berharap jawabannya adalah “siap” menerima kekalahan dengan legawa. Atau “siap menang” secara terhormat.

Harapan selanjutnya, pemilu serentak berlangsung lancar dan berakhir dengan aman dan damai. Namun hal itu belum cukup, masih harus dengan catatan, tingkat partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilih cukup besar dan sebaliknya jumlah golput kecil. Prinsip luber: langsung, umum, bebas, dan rahasia dan prinsip jurdil: jujur dan adil, benar-benar bisa diwujudkan. Kalau terjadi permasalahan, sedapat mungkin diselesaikan sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

Sungguh indah dan sejuk rasanya kalau akhir “pesta demokrasi” ini bisa diterima semua dengan lapang dada, negara tetap aman dan NKRI tetap tegak berdiri. Namun jujur saja, ada kekhawatiran pada rakyat kebanyakan, pada akar rumput, setelah pemilu akan terjadi suasana panas. Hal ini bisa terjadi kalau ada pihak yang kalah tetapi tidak bisa menerima kekalahan, tentu dengan berbagai alasan. Kita berharap persoalan yang muncul, misalnya ada indikasi pelanggaran UU Pemilu seperti terjadi kecurangan, intimidasi, politik uang, tidak jurdil dan lainnya, diselesaikan melalui lembaga yang ditentukan. Tidak perlu *ngamuk* menggerakkan massa. Jika ini yang terjadi, eksperimen pemilu serentak pun ternoda, keadaan bisa kacau dengan berbagai efeknya, tujuan melaksanakan demokrasi pun berubah menjadi *democracy*. (40)

—**Kusnadi Chandrajaya**, alumnus FISIP Undip, tinggal di Semarang.